

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

No. Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian belanja operasional kegiatan dan anggaran	Keluaran/Indikator Sub Kegiatan (harus sesuai Kepmendagri 050-5889-2021)	Target	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Hasil/ (indikator kegiatan; kumulasi dari indikator sub kegiatan)	Capaian program (indikator program sesuai RPJMD)	IKU yang dicapai	IKD yang dicapai	Sasaran/Penerima manfaat (BNBA, kelompok, nagari, disbnya)	Rencana Pengadaan (Cara pelaksanaan kegiatan)	Tempat Pelaksanaan Kegiatan (lokasi; titik koordinat)	Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Keuangan, dll)	Jadwal kegiatan (rincian waktu pelaksanaan kegiatan)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02														
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01														
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6.01.02.2.01.0002	594,240,500	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	72 Laporan	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Maksud : tersedianya anggaran untuk pelaksanaan keuangan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah, UPT Sekolah, UPT Puskesmas dan Pemerintahan Nagari oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Terlaksananya pengawasan internal pemerintah daerah selama 12 (Dua Belas) bulan	Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi internal dan Capaian Kinerja	Level Maturitas SPIP Pemda	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	72 Obrik yang terdiri dari 64 Pemerintahan Nagari , 8 Perangkat Daerah).	Swakelola (Non Urusan)	Kabupaten Pesisir Selatan (tersebar pada seluruh Kecamatan	PPTK dan PA	1. Penyusunan PPBR Tahun 2025 Triwulan III (N-1)
		5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur 300,800,000				Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan		Persentase tindak lanjut temuan		Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja					2. Penyusunan PKPT berbasis Risiko di Triwulan IV (N-1)
		5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 293,440,500					jumlah temuan BPK			Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI)					3. Penyusunan Program Kerja Audit (PKA) pada Triwulan I, II, III, dan IV 4. Menyiapkan bahan kendali mutu (KM) pada Triwulan I, II, III, dan IV 5. Melaksanakan Audit Ketaatan pada Triwulan I, II, III, dan IV 6. membuat laporan hasil pemeriksaan Audit Ketaatan pada Triwulan I, II, III, dan IV

Painan, September 2025

Diketahui Oleh
InspekturHELLEN HASNETTA SARI, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
NIP. 19760328 200301 2 004

Term of Reference (TOR) TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

No. Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian belanja operasional kegiatan dan anggaran	Keluaran/Indikator Sub Kegiatan (harus sesuai Kepmendagri 050-5889-2021)	Target	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Hasil/ (indikator kegiatan; kumulasi dari indikator sub kegiatan)	Capaian program (indikator program sesuai RPJMD)	IKU yang dicapai	IKD yang dicapai	Sasaran/Penerima manfaat (BNBA, kelompok, nagari, disbnya)	Rencana Pengadaan (Cara pelaksanaan kegiatan)	Tempat Pelaksanaan Kegiatan (lokasi; titik koordinat)	Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Keuangan, dll)	Jadwal kegiatan (rincian waktu pelaksanaan kegiatan)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02														
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01														
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6.01.02.2.01.0001	116,245,000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Laporan	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan penerapan SPM pada Perangkat Daerah oleh APJP Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Maksud : Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan Audit Kinerja dan asistensi penerapan SPM pada Perangkat Daerah oleh APJP Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Terlaksananya pengawasan internal pemerintah daerah selama 12 (Dua Belas) bulan	Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi internal dan Capaian Kinerja	Level Maturitas SPIP Pemda	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	3 Ombudsman yang terdiri dari perangkat Daerah yang mendukung program prioritas daerah yang dipilih oleh APIP	Swakelola (Non Urusan)	Perangkat Daerah Kecamatan IV Jurai	PPTK dan PA	1. Penyusunan PPBR Tahun 2025 Triwulan III (N-1)
		5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur 104,000,000				Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase tindak lanjut temuan		Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja					2. Penyusunan PKPT berbeasis Risiko di Triwulan IV (N-1)
		5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12,245,000						Jumlah temuan BPK		Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI)					3. Penyusunan Program Kerja Audit (PKA) pada Triwulan II, III, dan IV 4. Menyiapkan bahan kendali mutu (KM) pada Triwulan II, III, dan IV 5. Melaksanakan Audit Ketaatan pada Triwulan III dan IV 6. membuat laporan hasil pemeriksaan Audit Ketaatan


 Pesisir Selatan, 12 September 2025
 Ditandatangani oleh
 Kepala Inspektorat
 HELEN HASMETTA SARI, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
 NIP. 19780528 200501 2 004

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

No. Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian belanja operasional kegiatan dan anggaran	Keluaran/Indikator Sub Kegiatan (harus sesuai Kepmendagri 050-5889-2021)	Target	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Hasil/ (indikator kegiatan; kumulasi dari indikator sub kegiatan)	Capaian program (indikator program sesuai RPJMD)	IKU yang dicapai	IKD yang dicapai	Sasaran/Penerima manfaat (BNBA, kelompok, nagari, disbnya)	Rencana Pengadaan (Cara pelaksanaan kegiatan)	Tempat Pelaksanaan Kegiatan (lokasi; titik koordinat)	Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Keuangan, dll)	Jadwal kegiatan (rincian waktu pelaksanaan kegiatan)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02														
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.2.02														
3	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.2.02.0002	544,738,000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	34 Laporan : - 8 LHP Kasus/khusus - 6 LHP Khusus - 15 LH Probitas Audit - 4 LHP Perhitungan kerugian negara/daerah - 1 LHP Pengawasan BUMD	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Maksud : tersedianya anggaran untuk pemeriksaan khusus, pemeriksaan kasus, pengawasan BUMD, perhitungan kerugian keuangan daerah dan probity audit pada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah kasus pengaduan dilindungi Pemerintah Daerah selama 12 (Dua Belas) bulan	Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi internal dan Capaian Kinerja	Level Maturitas SPIP Penda	Nilai AKIP Inspektora t Daerah	34 Obrik yang terdiri dari Perangkat Daerah, Pemerintahan Nagari, UPT Sekolah dan UPT Puskesmas	Swakelola (Non Urusan)	Kabupaten Pesisir Selatan	PPTK dan PA	1. Surat masuk pengaduan (disposisi Bupati untuk diperiksa oleh APIP) pada Triwulan I, II, III, dan IV 2. Menetapkan Tim Pemeriksa pengaduan (Auditor dan PPUPD) pada Triwulan I, II, III, dan IV 3. Pembuatan ST Pemeriksaan dan menyusun PKA serta menyiapkan KM pada Triwulan I, II, III, dan IV 4. Menyediakan bahan kendali mutu (KM) pada Triwulan I, II, III, dan IV 5. Melaksanakan Audit pada Triwulan I, II, III, dan IV 6. membuat laporan hasil pemeriksaan Audit (LHP) pada Triwulan I, II, III, dan IV
		5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	376,320,000					Persentase tindak lanjut temuan		Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja					
		5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	168,418,000					jumlah temuan BPK		Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI)					

Painan, September 2025

Diketahui Oleh :
InspekturHELLEN HASMETTA SARI S.E.Ak.M.Ec.Dev.
NIP. 19780528 200501 2 004

Term of Reference (TOR) TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

No. Prio ritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian belanja operasional kegiatan dan anggaran		Keluaran/Ind ikator Sub Kegiatan(harus sesuai Kepmendagri 050-5889-2021)	Target	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Hasil/ (indikator kegiatan; kumulasi dari indikator sub kegiatan)	Capaian program (indikator program sesuai RPJMD)	IKU yang dicapai	IKD yang dicapai	Sasaran/Peneri ma manfaat (BNBA, kelompok, nagari, disbnnya)	Rencana Pengadaan (Cara pelaksanaan kegiatan)	Tempat Pelaksanaan Kegiatan (lokasi; titik koordinat)	Pelaksana dan penanggungjwab kegiatan (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Keuangan, dll)	Jadwal kegiatan (rincian waktu pelaksanaan kegiatan)	Ket
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02															
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01															
4	Reviu Laporan Kinerja	6.01.02.2.01.0003	82,263,500	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	102 Laporan : - 41 LHR LKJ PD - 41 LHE AKIP - LHE MR - 1 LHP LPPD - LHR Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggara ran Pemerintahan Daerah.	Maksud : tersedianya anggaran untuk pelaksanaan reviu terkait laporan kinerja Perangkat Daerah oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Terlaksanan ya pengawasan internal pemerintah daerah selama 12 (Dua Belas) bulan	Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi internal dan Capaian Kinerja	Level Maturit as SPIP Penda	Nilai AKIP Inspektora t Daerah	Perangkat Daerah terkait pelaksanaan Reviu dan Evaluasi kinerja oleh APIP	Swakelola (Non Urusan)	Perangkat Daerah Kecamatan IV Jurai	PPTK dan PA	1. Penetapan SK dan ST Tim Reviu ataupun Evaluasi pada Triwulan I	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11,487,500		- 1 LHR Manajemen ASN - 1 LHR Tatakelola BMD - LH Pengawasan e purchasing				Persentase tindak lanjut temuan		Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja					2. Pembagian tugas Tim pada triwulan I	
		5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 70,776,000		- 4 LHR penyerapan anggaran PBJ - 1 LHR Tata kelola Pajak - 1 LHR RPJMD - LHE PPRG - LHR TKDN - LHR Pelayanan publik - LHE RB	Peraturan Menteri Pendayagun aan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan Penyelenggara n Pengawasan Internal		jumlah temuan BPK		Opini BPK terkait Sistem Pengendali an Intern (SPI)					3. Permintaan dokumen terkait reviu atau evaluasi pada Triwulan, I, II 4. Pelaksanaan Reviu atau evaluasi dan Membuat laporan hasil reviu atau evaluasi pada Triwulan I, II, III dan IV	

No. Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian belanja operasional kegiatan dan anggaran	Keluaran/Indikator Sub Kegiatan(harus sesuai Kepmendagri 050-5889-2021)	Target	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Hasil/ (indikator kegiatan; kumulasi dari indikator sub kegiatan)	Capaian program (indikator program sesuai RPJMD)	IKU yang dicapai	IKD yang dicapai	Sasaran/Penerima manfaat (BNBA, kelompok, nagari, disbnya)	Rencana Pengadaan (Cara pelaksanaan kegiatan)	Tempat Pelaksanaan Kegiatan (lokasi; titik koordinat)	Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Keuangan, dll)	Jadwal kegiatan (rincian waktu pelaksanaan kegiatan)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah											



Term of Reference (TOR) TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

No. Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian belanja operasional kegiatan dan anggaran	Keluaran/Indikator Sub Kegiatan(harus sesuai Kepmendagri 050-5889-2021)	Target	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Hasil/(indikator kegiatan; kumulasi dari indikator sub kegiatan)	Capaian program (indikator program sesuai RPJMD)	IKU yang dicapai	IKD yang dicapai	Sasaran/Penerima manfaat (BNBA, kelompok, nagari, disbnya)	Rencana Pengadaan (Cara pelaksanaan kegiatan)	Tempat Pelaksanaan Kegiatan (lokasi; titik koordinat)	Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Keuangan, dll)	Jadwal kegiatan (rincian waktu pelaksanaan kegiatan)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02														
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01														
5	Reviu Laporan Keuangan	6.01.02.2.01.0004 234,992,000	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	300 Laporan : - 1 LHR LKPD - 2 LHR RKPD - 2 LHR KUA-PPAS dan KUPA-PPAS - 90 LHR DAK	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Maksud : tersedianya anggaran untuk pelaksanaan reviu terkait laporan keuangan Perangkat Daerah oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Terlaksananya pengawasan internal pemerintah daerah selama 12 (Dua Belas) bulan	Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi internal dan Capaian Kinerja	Level Maturitas SPIP Pemda	Nilai AKIP Inspektora t Daerah	Perangkat Daerah terkait pelaksanaan Reviu dan Evaluasi keuangan oleh APIP	Swakelola (Non Urusan)	Perangkat Daerah Kecamatan IV Jurai	PPTK dan PA	1. Penetapan SK dan ST Tim Reviu ataupun Evaluasi pada Triwulan I	
		5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 200,000,000		- 82 LHR RKA-P TA. 2025 dan RKA TA. 2026 - 3 LHR SHS, HSPK dan ASB - 1 LHR RKMBD - LHR Renja PD - LHR Hibah				Persentase tindak lanjut temuan		Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja					2. Pembagian tugas Tim pada triwulan I	
		5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34,992,000		- LHR Renstra PD - LHR RPJMD - 25 LHR RTP PD - 12 LHR Tagging	Permendagri No 4 Tahun 2008 tentang pelaksanaan reviu atas Laporan keuangan pemerintah daerah	Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		jumlah temuan BPK		Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI)					3. Permintaan dokumen terkait reviu atau evaluasi pada Triwulan I, II	
															4. Pelaksanaan Reviu atau evaluasi dan Membuat laporan hasil reviu atau evaluasi pada Triwulan I, II, III dan IV	

Painan, September 2025

Diketahui Oleh:
InspekturHELLEN HANNELTA SARI, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
NIP. 19780528 200501 2 004

Term of Reference (TOR) TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

No. Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian belanja operasional kegiatan dan anggaran	Keluaran/Indikator Sub Kegiatan (harus sesuai Kepmendagri 050-5889-2021)	Target	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Hasil/ (indikator kegiatan; kumulasi dari indikator sub kegiatan)	Capaian program (indikator program sesuai RPJMD)	IKU yang dicapai	IKD yang dicapai	Sasaran/Penerima manfaat (BNBA, kelompok, nagari, disnya)	Rencana Pengadaan (Cara pelaksanaan kegiatan)	Tempat Pelaksanaan Kegiatan (lokasi; titik koordinat)	Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Keuangan, dll)	Jadwal kegiatan (rincian waktu pelaksanaan kegiatan)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02														
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01														
6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6.01.02.2.01.0007 310,014,500	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen: Dokumen dan Laporan hasil Tindak Lanjut	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Maksud : tersedianya anggaran untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK dan APIP pada Perangkat Daerah, Pemerintahan Nagari, UPT Sekolah dan Puskesmas oleh APIP Inspektorat Daerah Pesisir Selatan	Terlaksananya pengawasan internal pemerintah daerah selama 12 (Dua Belas) bulan	Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi internal dan Capaian Kinerja	Level Maturitas SPIP Pemda	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	Perangkat Daerah, Pemerintahan Nagari, UPT Sekolah dan UPT Puskesmas terkait Tindak Lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Swakelola (Non Urusan)	Kabupaten Pesisir Selatan	PPTK dan PA	1. Mengentrikan temuan dan tindak lanjut baik pemeriksaan kasus, khusus, audit ketaatan, hasil pemeriksaan BPK dan APIP pada Triwulan I, II, III dan IV 2. Mengarsipkan LHP pada trwulan I, II, III dan IV 3. Membentuk Tim pelaksanaan TLHP dan membuat ST untuk pelaksanaan TLHP pada Triwulan, I, II, III, dan IV 4. mengarsipkan dokumen TLHP dan Membuat Laporan hasil pelaksanaan TLHP pada Triwulan I, II, III dan IV	
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20,400,000						Persentase Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan APIP		Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja						
		5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 289,614,500			Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		jumlah temuan BPK		Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI)						

Paiman, 25 September 2025

Diketahui Oleh
InspekturHELLEN HASMIETA SARI, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
NIP. 19780528 200501 2 004

Term of Reference (TOR) TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

No. Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian belanja operasional kegiatan dan anggaran		Keluaran/Indikator Sub Kegiatan(harus sesuai Kepmendagri 050-5889-2021)	Target	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Hasil/(indikator kegiatan; kumulasi dari indikator sub kegiatan)	Capaian program (indikator program sesuai RPJMD)	IKU yang dicapai	IKD yang dicapai	Sasaran/Penerima manfaat (BNBA, kelompok, nagari, disbnya)	Rencana Pengadaan (Cara pelaksanaan kegiatan)	Tempat Pelaksanaan Kegiatan (lokasi; titik koordinat)	Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Keuangan, dll)	Jadwal kegiatan (rincian waktu pelaksanaan kegiatan)	Ket
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03															
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	6.01.03.2.02															
7	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.03.2.02.0001	88,725,000	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	25 Perangkat Daerah	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Maksud : terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP terintegrasi PD dan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP)	Jumlah PD yang dievaluasi implementasi SPIP nya, Nilai penyelenggaraan SPIP terintegrasi, Hasil Penilaian kapabilitas APIP, Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan evaluasi RB general dan tematik, Indeks MCP dan Jumlah PD yang melakukan pembangunan ZI	Level Maturitas SPIP Pemda	Level Maturitas SPIP Pemda	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah terkait evaluasi	Perangkat Daerah	Swakelola (Non Urusan)	Kabupaten Pesisir Selatan	PPTK dan KPA	1. Sosialisasi pelaksanaan SPIP, PK APIP pada Triwulan I, II	
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43,560,000			Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah	Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi									2.Mempersiapkan dan upload dokumen terkait penyelenggaraan SPIP terintegrasi dan PK APIP pada triwulan I, II, III	
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22,400,000													3. Pelaksanaan Penilaian Mandiri SPIP masing-masing PD dan PK APIP pada Triwulan II, III	
		5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8,081,500			Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang		Terselenggaranya pendampingan, Asistensi dan koordinasi Penilaian SPIP. PK								4. Evaluasi hasil PM oleh BPKP serta konfirmasi hasil evaluasi pada Triwulan III dan IV	

No. Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian belanja operasional kegiatan dan anggaran	Keluaran/Indikator Sub Kegiatan[harus sesuai Kepmendagri 050-8889-2021]	Target	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Hasil/ (indikator kegiatan; kumulasi dari indikator sub kegiatan)	Capaian program (indikator program sesuai RPJMD)	IKU yang dicapai	IKD yang dicapai	Sasaran/Penerima manfaat (BNBA, kelompok, nagari, disbnya)	Rencana Pengadaan (Cara pelaksanaan kegiatan)	Tempat Pelaksanaan Kegiatan (lokasi; titik koordinat)	Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Keuangan, dll)	Jadwal kegiatan (rincian waktu pelaksanaan kegiatan)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14,683,500			Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian / Lembaga/ Pemerintah Daerah		APIP, RB, MCP dan Pembangunan Zona Integritas Pemerintah daerah								5. Tindak lanjut hasil Evaluasi pada triwulan IV dan N+1	



Banan, September 2025
 Mengetahui Oleh :
 Inspektur

HELLEN GASMEITA SARI, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
 NIP. 19780528 200501 2 004

Term of Reference (TOR) TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

No. Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian belanja operasional kegiatan dan anggaran	Keluaran/Indikator Sub Kegiatan(harus sesuai Kepmendagri 050-5889-2021)	Target	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Hasil/(indikator kegiatan; kumulasi dari indikator sub kegiatan)	Capaian program (indikator program sesuai RPJMD)	IKU yang dicapai	IKD yang dicapai	Sasaran/Penerima manfaat (BNBA, kelompok, nagari, disbnya)	Rencana Pengadaan (Cara pelaksanaan kegiatan)	Tempat Pelaksanaan Kegiatan (lokasi; titik koordinat)	Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Keuangan, dll)	Jadwal kegiatan (rincian waktu pelaksanaan kegiatan)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03														
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	6.01.03.2.02														
8	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	6.01.03.2.02.0002 21,504,000	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.	Maksud : terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP terintegrasi PD dan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP)	Jumlah PD yang dievaluasi implementasi SPIP nya, Nilai penyelenggaraan SPIP terintegrasi, Hasil Penilaian kapabilitas APIP, Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan evaluasi RB general dan tematik, Indeks MCP dan Jumlah PD yang melakukan pembangunan ZI	Level Maturitas SPIP Pemd	Level Maturitas SPIP Pemd	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah terkait evaluasi	Perangkat Daerah	Swakelola (Non Urusan)	Kabupaten Pesisir Selatan	PPTK dan KPA	1.Mempersiapkan dan entr. road map RB pada aplikasi portal RB dan upload dokumen terkait pelaksanaan RB general dan tematik oleh masing-masing operator RB pada triwulan I, II, III dan IV 2. pelaksanaan evaluasi internal RB general dan tematik oleh tim APIP pada Triwulan I, II, III dan IV	
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8,184,000														
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13,320,000														
		5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota -														
						Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi	Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi									3. Evaluasi eksternal pada tim dari kemenPAN RB Triwulan I, II, III dan IV 4. Hasil penilaian RB dari kemenPAN RB dan Tindak lanjut hasil Evaluasi pada triwulan IV dan N+1

No. Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian belanja operasional kegiatan dan anggaran	Keluaran/Indikator Sub Kegiatan(harus sesuai Kepmendagri 050-5889-2021)	Target	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Hasil/ (indikator kegiatan; kumulasi dari indikator sub kegiatan)	Capaian program (indikator program sesuai RPJMD)	IKU yang dicapai	IKD yang dicapai	Sasaran/Penerima manfaat (BNBA, kelompok, nagari, disbnya)	Rencana Pengadaan (Cara pelaksanaan kegiatan)	Tempat Pelaksanaan Kegiatan (lokasi; titik koordinat)	Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Keuangan, dll)	Jadwal kegiatan (rincian waktu pelaksanaan kegiatan)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															5. Hasil penilaian RB dari kementerian PAN RB dan Tindak lanjut hasil Evaluasi pada triwulan IV dan N+1	



Palman, 2 September 2025

Diketahui Oleh:
Inspektur

HELLEN HASMETTA SARI, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
NIP. 19780528 200501 2 004

Term of Reference (TOR) TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

No. Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian belanja operasional kegiatan dan anggaran	Keluaran/Indikator Sub Kegiatan (harus sesuai Kepmendagri 050-5889-2021)	Target	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Hasil/ (indikator kegiatan; kumulasi dari indikator sub kegiatan)	Capaian program (indikator program sesuai RPJMD)	IKU yang dicapai	IKD yang dicapai	Sasaran/Penerima manfaat (BNBA, kelompok, nagari, dlebya)	Rencana Pengadaan (Cara pelaksanaan kegiatan)	Tempat Pelaksanaan Kegiatan (lokasi; titik koordinat)	Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Keuangan, dll)	Jadwal kegiatan (rincian waktu pelaksanaan kegiatan)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01														
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.01.01.2.02														
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.01.01.2.02.0001 9,974,497,510	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	756 Orang/bulan	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,	Maksud : memfasilitasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selama 1 (satu) Tahun Anggaran	Jumlah ASN yang menerima gaji, tunjangan dan honorarium per bulannya, yaitu 55 Orang/bulan	Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja	Level Maturitas SPIP Pemda	Nilai AKIP Inspektora t Daerah	ASN Inspektorat Daerah	Swakelola (Non Urusan)	Kabupaten Pesisir Selatan	PPTK dan PA	1. Pengitungan dan pembuatan daftar gaji dan tunjangan ASN oleh PPTK setiap bulan	
		5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4,737,097,510			Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil	Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Nilai AKIP Inspektora t Daerah		Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja					2. verifikasi daftar gaji dan tunjangan ASN oleh PPK setiap bulan	
		5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5,237,400,000						Nilai Kematangan Inovasi Inspektora t Daerah		Nilai Kematangan Inovasi Inspektora t Daerah					3. Pembuatan SPP, SPM Gaji dan upload dokumen pada aplikasi SIPD RI oleh bendahara pengeluaran setiap bulan 3. verifikasi SPP, SPM Gaji pada aplikasi SIPD RI oleh PPK dan PA setiap bulan 4. Penyerahan dokumen SPP, SPM dan kelengkapan lainnya ke BUD 5.. Verifikasi dan proses SP2D - LS gaji dan tunjangan oleh BUD , dan penyerahan ke Bank Nagari setiap bulan	

Term of Reference (TOR) TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

No. Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian belanja operasional kegiatan dan anggaran	Keluaran/Indikator Sub Kegiatan(harus sesuai Kepmendagri 050-5889-2021)	Target	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Hasil/ (indikator kegiatan; kumulasi dari indikator sub kegiatan)	Capaian program (indikator program sesuai RPJMD)	IKU yang dicapai	IKD yang dicapai	Sasaran/Penerima manfaat (BNEA, kelompok, nagari, disbnya)	Rencana Pengadaan (Cara pelaksanaan kegiatan)	Tempat Pelaksanaan Kegiatan (lokasi; titik koordinat)	Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Keuangan, dll)	Jadwal kegiatan (rincian waktu pelaksanaan kegiatan)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01														
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.01.01.2.02														
10	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.01.01.2.02.0002	199,470,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,	Maksud : terlaksananya Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (pembayaran honorarium pengelola keuangan)	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangan dan Honorarium	Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja	Level Maturitas SPIP Pemda	Nilai AKIP Inspektora t Daerah	ASN Inspektorat Daerah	Swakelola (Non Urusan)	Kabupaten Pesisir Selatan	PPTK dan PA	1. Pengitungan dan pembuatan daftar honorarium pengelola Keuangan oleh PPTK dan pengajuan Nota Pencairan dana pada aplikasi SIPD RI setiap bulan
		5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1,000,000			Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional	Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi keuangan daerah		Nilai AKIP Inspektora t Daerah		Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja					2. verifikasi NPD GU oleh PPK dan PA setiap bulan
		5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur	50,750,000			Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 29 Tahun 2023			Nilai Kematangan Inovasi Inspektora t Daerah		Nilai Kematangan Inovasi Inspektora t Daerah					3. Pembuatan TBP dan upload dokumen pada aplikasi SIPD RI oleh BPP setiap bulan
		5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	147,720,000			Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024										3. Pembuatan LPJ - GU untuk seluruh TBP bendahara pengeluaran Pembantu pada aplikasi SIPD RI setiap bulan 3. verifikasi LPJ - GU pada aplikasi SIPD RI oleh PPK dan PA setiap bulan

No. Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian belanja operasional kegiatan dan anggaran	Keluaran/Indikator Sub Kegiatan (harus sesuai Kepmendagri 080-5889-2021)	Target	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Hasil/ (indikator kegiatan; kumulasi dari indikator sub kegiatan)	Capaian program (indikator program sesuai RPJMD)	IKU yang dicapai	IKD yang dicapai	Sasaran/Penerima manfaat (BNBA, kelompok, nagari, disbnya)	Rencana Pengadaan (Cara pelaksanaan kegiatan)	Tempat Pelaksanaan Kegiatan (lokasi; titik koordinat)	Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Keuangan, dll)	Jadwal kegiatan (rincian waktu pelaksanaan kegiatan)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															4. Pembuatan SPP, SPM -GU dari LPJ- BPP dan seluruh TBP Bendahara Pengeluaran dari akun BP 4. Verifikasi oleh PPK, PA dan Penyerahan dokumen SPP, SPM -GU dan kelengkapan lainnya ke BUD 5.. Verifikasi dan proses SP2D oleh BUD , dan penyerahan ke Bank Nagari setiap bulan 6. Transfer oleh BP / BPP ke Rekening masing-masing penerima	


 Paiman, ... September 2023
 L. Hellen Hasmeita Sari
 Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
 NIP. 19780328-2005012-004

Term of Reference (TOR) TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

No. Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian belanja operasional kegiatan dan anggaran	Keluaran/Indikator Sub Kegiatan harus sesuai Kepmendagri 050-5889-2021)	Target	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Hasil/ (indikator kegiatan; kumulasi dari indikator sub kegiatan)	Capaian program (indikator program sesuai RPJMD)	IKU yang dicapai	IKD yang dicapai	Sasaran/Penerima manfaat (BNBA, kelompok, nagari, disbnya)	Rencana Pengadaan (Cara pelaksanaan kegiatan)	Tempat Pelaksanaan Kegiatan (lokasi; titik koordinat)	Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Keuangan, dll)	Jadwal kegiatan (rincian waktu pelaksanaan kegiatan)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01														
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.01														
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.01.01.2.02.0001 65,564,500	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	Maksud : tersedianya anggaran untuk penyusunan, evaluasi dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selama 12 (Dua Belas) bulan, antara lain dokumen Perencanaan, Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR), Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dokumen Perjanjian Kinerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Prosedur Operasional (PO) Kegiatan, dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) and Gender Budget Statemen (GAB), dan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Inspektorat	Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja	Level Maturitas SPIP Pemda	Nilai AKIP Inspektora t Daerah	ASN Inspektorat Daerah	Swakelola (Non Urusan)	Kabupaten Pesisir Selatan	PPTK dan KPA	1. Instruksi pimpinan/ surat undangan untuk penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada triwulan I, II, III, IV	
		5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 36,880,000			Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional	Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP Inspektora t Daerah		Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja					2. Pembentukan tim untuk penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada triwulan I, II, III, IV	
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 605,000			Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 29 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024			Nilai Kematangan Inovasi Inspektora t Daerah		Nilai Kematangan Inovasi Inspektora t Daerah					3. rapat internal untuk penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada triwulan I, II, III, IV	

No. Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian belanja operasional kegiatan dan anggaran	Keluaran/Indikator Sub Kegiatan harus sesuai Kepmendagri 050-5889-2021)	Target	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Hasil/ (indikator kegiatan; kumulasi dari indikator sub kegiatan)	Capaian program (indikator program sesuai RPJMD)	IKU yang dicapai	IKD yang dicapai	Sasaran/Penerima manfaat (BNBA, kelompok, nagari, dllnya)	Rencana Pengadaan (Cara pelaksanaan kegiatan)	Tempat Pelaksanaan Kegiatan (lokasi; titik koordinat)	Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Keuangan, dll)	Jadwal kegiatan (rincian waktu pelaksanaan kegiatan)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28,079,500					Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah								3. penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 3. verifikasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah oleh sekretaris dan Inspektur pada triwulan I, II, III, IV 4. Perbaikan dan finalisasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah oleh tim pada triwulan I, II, III, IV	

Paitan, September 2025
 Disetujui Oleh:
 Inspektur,

 HELEN HASMITA SARI, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
 NIP. 19780528 200501 2 004

Term of Reference (TOR) TAHUN 2025**PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH**[illegible]

No. Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian belanja operasional kegiatan dan anggaran	Keluaran/Indikator Sub Kegiatan (harus sesuai Kepmendagri 050-5889-2021)	Target	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Hasil/ (indikator kegiatan; kumulasi dari indikator sub kegiatan)	Capaian program (indikator program sesuai RPJMD)	IKU yang dicapai	IKD yang dicapai	Sasaran/Penerima manfaat (BNBA, kelompok, nagari, disbnya)	Rencana Pengadaan (Cara pelaksanaan kegiatan)	Tempat Pelaksanaan Kegiatan (lokasi; titik koordinat)	Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Keuangan, dll)	Jadwal kegiatan (rincian waktu pelaksanaan kegiatan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 99,800,000			n Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Kompetensi Dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor										



Term of Reference (TOR) TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

No. Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian belanja operasional kegiatan dan anggaran		Keluaran/Indikator Sub Kegiatan(harus sesuai Kepmendagri 050-5889-2021)	Target	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Hasil/ (indikator kegiatan; kumulasi dari indikator sub kegiatan)	Capaian program (indikator program sesuai RPJMD)	IKU yang dicapai	IKD yang dicapai	Sasaran/Penerima manfaat (BNBA, kelompok, nagari, disbnnya)	Rencana Pengadaan (Cara pelaksanaan kegiatan)	Tempat Pelaksanaan Kegiatan (lokasi; titik koordinat)	Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Keuangan, dll)	Jadwal kegiatan (rincian waktu pelaksanaan kegiatan)	Ket
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01															
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06															
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.01.01.2.06.01	4,243,640	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kantor	Maksud : tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja	Level Maturitas SPIP Pemd	Nilai AKIP Inspektora t Daerah	ASN Inspektora t Daerah	Swakelola (Non Urusan)	Kabupaten Pesisir Selatan	PPTK dan PA	1. Pengajuan usulan ASN APIP untuk mengikuti diklat sesuai kalender diklat dari BPKP dan Kemendagri pada triwulan IV N-1 2. Surat pemanggilan Peserta diklat dari penyelenggara pada triwulan I, II, III dan IV 2. Membuat ST pelaksanaan diklat bagi ASN yang terpanggil pada triwulan I, II, III, IV 3. mengikuti diklat sesuai jadwal dari penyelenggara 3. Membuat laporan hasil pelaksanaan diklat pada triwulan I, II, III, IV	
		5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Behan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4,243,640		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional		Jumlah Paket penunjang administrasi umum kantor yang Disediakan									
						Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 29 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga	Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas ASN		Nilai AKIP Inspektora t Daerah		Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja						
									Nilai Kematangan Inovasi Inspektora t Daerah		Nilai Kematangan Inovasi Inspektora t Daerah						


 RAINUN, 22 September 2025
 Widyakatah Olen Inspektur
 ELLEN HASMETTA SARI, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
 NIP. 19780528 200501 2 004

Term of Reference (TOR) TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

No. Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian belanja operasional kegiatan dan anggaran	Keluaran/Indikator Sub Kegiatan(harus sesuai Kepmendagri 050-5889-2021)	Target	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Hasil/(indikator kegiatan; kumulasi dari indikator sub kegiatan)	Capaian program (indikator program sesuai RPJMD)	IKU yang dicapai	IKD yang dicapai	Sasaran/Penerima manfaat (BNBA, kelompok, nagari, disbnya)	Rencana Pengadaan (Cara pelaksanaan kegiatan)	Tempat Pelaksanaan Kegiatan (lokasi; titik koordinat)	Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Keuangan, dll)	Jadwal kegiatan (rincian waktu pelaksanaan kegiatan)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.01.01														
	Administrasi Umum	6.01.01.2.06														
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.01.01.2.06.0004 141,172,390	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional	Maksud : tercukupinya kebutuhan bahan logistik kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja	Level Matutitas SPIP Pemda	Nilai AKIP Inspektora t Daerah	ASN Inspektora t Daerah	Penyedia (e-Purchasing)	Kabupaten Pesisir Selatan	PPTK dan PA	1. Entri rencana pengadaan pada aplikasi sirup LPSE pada triwulan I 2. Membuat kebutuhan ATK 3. Pemesanan Kebutuhan ATK dengan sistem e-purchasing per triwulan 4. Pencatatan Penerimaan Barang Pakai Habis dari toko, Pendistribusian ATK ke Irban dan subbagian 5. Pencatatan Pengeluaran Barang Pakai Habis.	
		5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 141,172,390			Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 29 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	Tujuan : Mendukung kelancaran operasional administrasi umum Inspektorat Daerah.	Jumlah Paket penunjang administrasi umum kantor yang Disediakan	Nilai AKIP Inspektor at Daerah Nilai Kematangan Inovasi Inspektor at Daerah		Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Inspektora t Daerah						

Painan, September 2025
 Ditandatangani Oleh :
 Kepala Inspektorat
 HELLEN HASMETTA SARI, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
 NIP. 19780528 200501 2 004

Term of Reference (TOR) TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

No. Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian belanja operasional kegiatan dan anggaran	Keluaran/Indikator Sub Kegiatan (harus sesuai Kepmendagri 050-5889-2021)	Target	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Hasil/ (indikator kegiatan; kumulasi dari indikator sub kegiatan)	Capaian program (indikator program sesuai RPJMD)	IKU yang dicapai	IKD yang dicapai	Sasaran/Penerima manfaat (BNBA, kelompok, nagari, di lainnya)	Rencana Pengadaan (Cara pelaksanaan kegiatan)	Tempat Pelaksanaan Kegiatan (lokasi; titik koordinat)	Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Keuangan, dll)	Jadwal kegiatan (rincian waktu pelaksanaan kegiatan)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01														
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06														
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.01.01.2.06.0005	162,466,397	Jumlah Paket 12 Paket	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,	Maksud : terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selama 1 (satu) tahun anggaran	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja	Level Maturitas SPIP Pemda	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	ASN Inspektorat Daerah	Penyedia (e-Purchasing)	Kabupaten Pesisir Selatan	PPTK dan PA	1. Entri rencana pengadaan pada aplikasi sirup LPSE pada triwulan I 2. Membuat kebutuhan barang cetak dan penggandaan per Triwulan 3. Pemesanan Kebutuhan barang cetak dan penggandaan dengan sistem e-purchasing per triwulan 4. Pencatatan Penerimaan Barang Pakai Habis dari toko, Pendistribusian barang ke Irban dan subbagian 5. Pencatatan Pengeluaran Barang Pakai Habis.	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 162,466,397		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 29 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	Tujuan : Mendukung kelancaran operasional administrasi umum Inspektorat Daerah.	Jumlah Paket penunjang administrasi umum kantor yang Disediakan	Nilai AKIP Inspektorat Daerah Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah		Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah						



Term of Reference (TOR) TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

No. Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian belanja operasional kegiatan dan anggaran	Keluaran/Indikator Sub Kegiatan(harus sesuai Kepmendagri 080-5889-2021)	Target	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Hasil/(indikator kegiatan; kumulasi dari indikator sub kegiatan)	Capaian program (indikator program sesuai RPJMD)	IKU yang dicapai	IKD yang dicapai	Sasaran/Penerima manfaat (BNBA, kelompok, nagari, disbnya)	Rencana Pengadaan (Cara pelaksanaan kegiatan)	Tempat Pelaksanaan Kegiatan (lokasi; titik koordinat)	Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Keuangan, dll)	Jadwal kegiatan (rincian waktu pelaksanaan kegiatan)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01														
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06														
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.01.01.2.06.0008 54,893,830	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,	Maksud : tersedianya kebutuhan fasilitas (Makanan dan minuman) untuk Tamu	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja	Level Maturitas SPIIP Pemda	Nilai AKIP Inspektora t Daerah	ASN Inspektora t Daerah	Swakelola (Non Urusan)	Kabupaten Pesisir Selatan	PPTK dan PA	1. Entri rencana pengadaan pada aplikasi sirup LPSE pada triwulan I	
		5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 20,693,830			Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional	Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas ASN dan memperlancar Administrasi perkantoran	Jumlah Paket penunjang administrasi umum kantor yang Disediakan									2. Penyediaan fasilitas (makanan dan minuman) kunjungan Tamu kedinasan setiap bulan
		5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 34,200,000			Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 29 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024			Nilai AKIP Inspektora t Daerah		Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja						3. Setiap tamu mengisi daftar hadir kunjungan tamu
								Nilai Kematangan Inovasi Inspektora t Daerah		Nilai Kematangan Inovasi Inspektora t Daerah						4. Membuat laporan kunjungan tamu per bulan



Term of Reference (TOR) TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

No. Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian belanja operasional kegiatan dan anggaran	Keluaran/Indikator Sub Kegiatan (harus sesuai Kepmendagri 050-5889-2021)	Target	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Hasil/ (indikator kegiatan; kumulasi dari indikator sub kegiatan)	Capaian program (indikator program sesuai RPJMD)	IKU yang dicapai	IKD yang dicapai	Sasaran/Penerima manfaat (BNBA, kelompok, nagari, dllnya)	Rencana Pengadaan (Cara pelaksanaan kegiatan)	Tempat Pelaksanaan Kegiatan (lokasi; titik koordinat)	Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Keuangan, dll)	Jadwal kegiatan (rincian waktu pelaksanaan kegiatan)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01														
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.01.01.2.06.0009 505,163,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 29 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	Maksud : tersedianya kebutuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas ASN dan memperlancar Administrasi perkantoran	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket penunjang administrasi umum kantor yang Disediakan	Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja Nilai AKIP Inspektoriat Daerah	Level Maturitas SPIP Penda Nilai AKIP Inspektoriat Daerah	Nilai AKIP Inspektoriat Daerah Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Inspektoriat Daerah	ASN Inspektoriat Daerah Swakelola (Non Urusan)	Kabupaten Pesisir Selatan	PPTK dan PA	1. Entri rencana pengadaan pada aplikasi sirup LPSE pada triwulan I 2. Penyediaan fasilitas 3. Membuat ST Koordinasi dan konsultasi / Membuat Undangan pelaksanaan rapat koordinasi 4. Menyiapkan dan mengisi daftar hadir rapat koordinasi dan konsultasi 5. Membuat Notulen / laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi	Januari s.d Desember 2025	
		5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 72,358,000														
		5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 412,675,000						Nilai AKIP Inspektoriat Daerah		Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja						
		5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20,130,000						Nilai Kematangan Inovasi Inspektoriat Daerah		Nilai Kematangan Inovasi Inspektoriat Daerah						



Term of Reference (TOR) TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

No. Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian belanja operasional kegiatan dan anggaran	Keluaran/Indikator Sub Kegiatan(harus sesuai Kepmendagri 050-5889-2021)	Target	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Hasil/(indikator kegiatan; kumulasi dari indikator sub kegiatan)	Capaian program (indikator program sesuai RFJMD)	IKU yang dicapai	IKD yang dicapai	Sasaran/Penerima manfaat (BNBA, kelompok, nagari, disbnya)	Rencana Pengadaan (Cara pelaksanaan kegiatan)	Tempat Pelaksanaan Kegiatan (lokasi; titik koordinat)	Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Keuangan, dll)	Jadwal kegiatan (rincian waktu pelaksanaan kegiatan)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01														
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06														
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.01.01.2.06.06	1,800,000	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kabupaten Pesisir Selatan	Maksud : tersedianya kebutuhan Bahan bacaan di Inspektorat Daerah kabupaten Pesisir Selatan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja	Level Maturitas SPIP Pemda	Nilai AKIP Inspektora t Daerah	ASN Inspektorat Daerah	Swakelola (Non Urusan)	Kabupaten Pesisir Selatan	PPTK dan PA	1. Entri rencana pengadaan pada aplikasi sirup LPSE pada triwulan I 2. Penyediaan Bahan bacaan (koran/majalah) setiap bulan 3. Proses Pencatran dana pada SIPD RI 4. Pembayaran tagihan non tunai oleh BP
		5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1,800,000		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional	Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas ASN dan memperlancar Adminstrasi perkantoran	Jumlah Paket penunjang administrasi umum kantor yang Disediakan	Nilai AKIP Inspektora t Daerah		Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja					
						Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 29 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024			Nilai Kematangan Inovasi Inspektora t Daerah		Nilai Kematangan Inovasi Inspektora t Daerah					



Term of Reference (TOR) TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

No. Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian belanja operasional kegiatan dan anggaran	Keluaran/Indikator Sub Kegiatan harus sesuai Kependagri 050-5889-2021)	Target	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Hasil/ (indikator kegiatan; kumulasi dari indikator sub kegiatan)	Capaian program (indikator program sesuai RPJMD)	IKU yang dicapai	IKD yang dicapai	Sasaran/Penerima manfaat (BNBA, kelompok, nagari, disnya)	Rencana Pengadaan (Cara pelaksanaan kegiatan)	Tempat Pelaksanaan Kegiatan (lokasi; titik koordinat)	Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Keuangan, dll)	Jadwal kegiatan (rincian waktu pelaksanaan kegiatan)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01														
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.08													Januari s.d Desember 2025	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.01.01.2.08.0002	95,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,	Maksud : tersedianya kebutuhan pembayaran tagihan air dan listrik kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Terselenggaranya kegiatan kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja	Level Maturitas SPIP Pemda	Nilai AKIP Inspektora t Daerah	ASN Inspektorat Daerah	Swakelola (Non Urusan)	Kabupaten Pesisir Selatan	PPTK dan KPA	1. Mencek tagihan air dan listrik melalui aplikasi pembayaran pihak ketiga per bulan 2. Membuat BPK untuk pembayaran tagihan air dan listrik oleh BPP 3. Membuat NPD untuk pembayaran tagihan oleh PPKT, verifikasi NPD oleh PPK dan KPA pada aplikasi SIPD RI
		5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air	12,000,000			Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional	Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas ASN dan memperlancar Administrasi perkantoran	Tersedianya pembayaran tagihan air, listrik dan Honorarium Non ASN								4. Memproses TBP tagihan air dan listrik oleh BPP 5. Pembayaran tagihan secara Non Tunai oleh BPP
		5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik	48,000,000			Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 29 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024			Nilai AKIP Inspektor at Daerah		Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja Nilai Kematang an Inovasi Inspektora t Daerah					
		5.1.02.02.01.0065 Penambahan Daya	35,000,000													

Painan, September 2025

Diketahui oleh Inspektur,

HELLEN HASMETTA SARI, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
NIP. 19780528 200501 2 004

Term of Reference (TOR) TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

[illegible]

No. Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian belanja operasional kegiatan dan anggaran	Keluaran/Indikator Sub Kegiatan (harus sesuai Kepmendagri 050-5889-2021)	Target	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Hasil/Indikator kegiatan; kumulasi dari indikator sub kegiatan)	Capaian program (indikator program sesuai RPJMD)	IKU yang dicapai	IKD yang dicapai	Sasaran/Penerima manfaat (BNBA, kelompok, nagari, disbnya)	Rencana Pengadaan (Cara pelaksanaan kegiatan)	Tempat Pelaksanaan Kegiatan (lokasi; titik koordinat)	Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Keuangan, dll)	Jadwal kegiatan (rincian waktu pelaksanaan kegiatan)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 21,000,000														
		5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 600,000														



Term of Reference (TOR) TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

No. Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian belanja operasional kegiatan dan anggaran	Keluaran/Indikator Sub Kegiatan(harus sesuai Kepmendagri 050-5889-2021)	Target	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Hasil/(indikator kegiatan; kumulasi dari indikator sub kegiatan)	Capaian program (indikator program sesuai RPJMD)	IKU yang dicapai	IKD yang dicapai	Sasaran/Penerima manfaat (BNBA, kelompok, nagari, disbnya)	Rencana Pengadaan (Cara pelaksanaan kegiatan)	Tempat Pelaksanaan Kegiatan (lokasi; titik koordinat)	Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Keuangan, dll)	Jadwal kegiatan (rincian waktu pelaksanaan kegiatan)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01														
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.09													Januari s.d Desember 2025	
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.01.01.2.09.0001 41,114,600	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,	Maksud : tersedianya kebutuhan pembayaran pajak kendaraan dan pemeliharaan kendaraan pimpinan	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja	Level Maturitas SPIP Pemda	Nilai AKIP Inspektora t Daerah	ASN Inspektora t Daerah	Penyedia (e-purchasing)	Kabupaten Pesisir Selatan	PPTK dan PA	1. Entri rencana pengadaan pada aplikasi sirup LPSE pada triwulan I 2. Memilih penyedia dan membuat pesanan untuk pemeriharaan kendaraan sesuai e catalog 3. Proses e-purchasing pada aplikasi LPSE 4. Proses perbaikan/pemeliharaan kendaraan pada toko tersebut 5. Proses Pencairan dana pada SIPD RI 6. Pembayaran tagihan non tunai oleh BP	
		5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1,924,600			Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional	Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas ASN dan memperlancar Adminstrasi perkantoran	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan, peralatan dan mesin operasional kantor	Nilai AKIP Inspektora t Daerah		Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja						
		5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 39,190,000			Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 29 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024			Nilai Kematangan Inovasi Inspektora t Daerah		Nilai Kematangan Inovasi Inspektora t Daerah						

Painan, September 2025

Diketahui oleh
Inspektur,HELLEN HASMERTA SARI, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
NIP. 19780528 200501 2 004

Term of Reference (TOR) TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

No. Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian belanja operasional kegiatan dan anggaran	Keuaran/Indikator Sub Kegiatan[harus sesuai Kemendagri 050-5889-2021]	Target	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Hasil/ (indikator kegiatan, kumulasi dari indikator sub kegiatan)	Capaian program (indikator program sesuai RPJMD)	IKU yang dicapai	IKD yang dicapai	Sasaran/Penerima manfaat (BNBA, kelompok, nagari, lainnya)	Rencana Pengadaan (Cara pelaksanaan kegiatan)	Tempat Pelaksanaan Kegiatan (lokasi; titik koordinat)	Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Keuangan, dll)	Jadwal kegiatan (rincian waktu pelaksanaan kegiatan)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01														
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.09													Januari s.d Desember 2025	
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.01.01.2.09.0002 212,727,428	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,	Maksud : tersedianya kebutuhan pembayaran pajak kendaraan roda 2 dan Roda 4 serta pemeliharaan kendaraan operasional kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja	Level Maturitas SPIP Penda	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	ASN Inspektorat Daerah	Penyedia (e-purchasing)	Kabupaten Pesisir Selatan	PPTK dan PA	1. Entri rencana pengadaan pada aplikasi sirup LPSE pada triwulan I 2. Memilih penyedia dan membuat pesanan untuk pemeliharaan kendaraan sesuai e catalog 3. Proses e-purchasing pada aplikasi LPSE 4. Proses perbaikan/pemeliharaan kendaraan pada toko tersebut 5. Proses Pencatran dana pada SIPD RI 6. Pembayaran tagihan non tunai oleh BP	
		5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8,127,428			Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional	Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas ASN dan memperlancar Administrasi perkantoran	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan, peralatan dan mesin operasional kantor									
		5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Pemungung 204,600,000			Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 29 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024			Nilai AKIP Inspektorat Daerah		Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja						
								Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah		Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah						

Painan, September 2025

Diketahui oleh :
Inspektur

HOLLEN HASMEITA SARI, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
NIP. 19780528 200501 2 004



Term of Reference (TOR) TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

No. Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian belanja operasional kegiatan dan anggaran	Keluaran/Indikator Sub Kegiatan(harus sesuai Kepmendagri 050-5889-2021)	Target	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Hasil/(indikator kegiatan; kumulasi dari indikator sub kegiatan)	Capaian program (indikator program sesuai RPJMD)	IKU yang dicapai	IKD yang dicapai	Sasaran/Penerima manfaat (BNBA, kelompok, nagari, disbnnya)	Rencana Pengadaan (Cara pelaksanaan kegiatan)	Tempat Pelaksanaan Kegiatan (lokasi; titik koordinat)	Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Keuangan, dll)	Jadwal kegiatan (rincian waktu pelaksanaan kegiatan)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01														
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.09													Januari s.d Desember 2025	
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.01.01.2.09.0006 44,200,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,	Maksud : tersedianya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin (AC, Lapto/pronter, Genset)	Terselenggaraanya Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja	Level Maturitas SPIP Pemda	Nilai AKIP Inspektora t Daerah	ASN Inspektorat Daerah	Penyedia (e-purchasing)	Kabupaten Pesisir Selatan	PPTK dan PA	1. Entri rencana pengadaan pada aplikasi sirup LPSE pada triwulan I	
		5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	20,000,000		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional	Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas ASN dan memperlancar Administrasi perkantoran	Jumlah unit pemeliharaan n kendaraan, peralatan dan mesin operasional kantor	Nilai AKIP Inspektora t Daerah		Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja					2. Memilih penyedia dan membuat pesanan untuk pemeliharaan kendaraan sesuai e catalog	
		5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan n Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	6,750,000		Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 29 Tahun 2023 tentang Standar			Nilai Kematangan Inovasi Inspektora t Daerah		Nilai Kematangan Inovasi Inspektora t Daerah					3. Proses e-purchasing pada aplikasi LPSE	
		5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan n Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5,000,000												4. Proses perbaikan/pemeliharaan peralatan mesin pada toko tersebut	
		5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan n Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2,450,000												5. Proses Pencairan dana pada SIPD RI	
															6. Pembayaran tagihan non tunai oleh BP	

No. Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian belanja operasional kegiatan dan anggaran	Keluaran/Indikator Sub Kegiatan[harus sesuai Kepmendagri 050-5889-2021]	Target	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Hasil/ (indikator kegiatan; kumulasi dari indikator sub kegiatan)	Capaian program (indikator program sesuai RPJMD)	IKU yang dicapai	IKD yang dicapai	Sasaran/Penerima manfaat (BNBA, kelompok, nagari, disbnya)	Rencana Pengadaan (Cara pelaksanaan kegiatan)	Tempat Pelaksanaan Kegiatan (lokasi; titik koordinat)	Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Keuangan, dll)	Jadwal kegiatan (rincian waktu pelaksanaan kegiatan)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 10,000,000														


 Palembang, September 2023
 Inspektur
 HELLEN HASMETTA SARI, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
 NIP. 19780528 200501 2 004

Term of Reference (TOR) TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

No. Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian belanja operasional kegiatan dan anggaran	Keluaran/Indikator Sub Kegiatan(harus sesuai Kepmendagri 050-5889-2021)	Target	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Hasil/ (indikator kegiatan; kumulasi dari indikator sub kegiatan)	Capaian program (indikator program sesuai RPJMD)	IKU yang dicapai	IKD yang dicapai	Sasaran/Penerima manfaat (BNBA, kelompok, nagari, disbnya)	Rencana Pengadaan (Cara pelaksanaan kegiatan)	Tempat Pelaksanaan Kegiatan (lokasi; titik koordinat)	Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Keuangan, dll)	Jadwal kegiatan (rincian waktu pelaksanaan kegiatan)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01														
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.09													Januari s.d Desember 2025	
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.01.01.2.09.09	304,276,220	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 Unit	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,	Maksud : tersedianya kebutuhan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja	Level Maturitas SPIP Pemda	Nilai AKIP Inspektora t Daerah	ASN Inspektorat Daerah	Penyedia (e-Pengadaan Langsung)	Kabupaten Pesisir Selatan	PPTK dan PA	1. Entri rencana pengadaan pada aplikasi sirup LPSE pada triwulan I
		5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan n Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	6,000,000		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan n pembangunan nasional	Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas ASN dan memperlancar Adminstrasi perkantoran	Jumlah unit pemeliharaan n kendaraan, peralatan dan mesin operasional kantor	Nilai AKIP Inspektora t Daerah		Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja					2. Membuat kontrak swakelola Rehabilitasi/ pemeliharaan gedung Kantor
		5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan n Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	298,276,220		Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 29 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024			Nilai Kematangan Inovasi Inspektora t Daerah		Nilai Kematangan Inovasi Inspektora t Daerah					3. Pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi/ pemeliharaan gedung Kantor secara swakelola
																4. Pekerjaan selesai, membuat Berita Acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara
																5. Proses Pencaitran dana pada SIPD RI
																6. Pembayaran tagihan non tunai oleh BP

Painan, September 2025

Diketahui Oleh :
InspekturHELLEN HASMEITA SARI, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
NIP. 19780528 200501 2 004

Term of Reference (TOR) TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

No. Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian belanja operasional kegiatan dan anggaran	Keluaran/Indikator Sub Kegiatan harus sesuai Kepmendagri 050-5889-2021)	Target	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Hasil/ (indikator kegiatan; kumulasi dari indikator sub kegiatan)	Capaian program (indikator program sesuai RPJMD)	IKU yang dicapai	IKD yang dicapai	Sasaran/Penerima manfaat (BNBA, kelompok, nagari, disbnya)	Rencana Pengadaan (Cara pelaksanaan kegiatan)	Tempat Pelaksanaan Kegiatan (lokasi; titik koordinat)	Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Keuangan, dll)	Jadwal kegiatan (rincian waktu pelaksanaan kegiatan)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01														
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.01.01.2.07													Januari s.d Desember 2025	
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.01.01.2.07.0006 89,440,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,	Maksud : tersedianya kebutuhan peralatan mesin lainnya (AC kantor)	Terselenggara ranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja	Level Maturitas SPIP Pemda	Nilai AKIP Inspektora t Daerah	ASN Inspektora t Daerah	Penyedia (e-purchasing)	Kabupaten Pesisir Selatan	PPTK dan PA	1. Entri rencana pengadaan pada aplikasi sirup LPSE pada triwulan I	
		5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 60,000,000			Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional	Tujuan : Mendukung operasional pelaksanaan tugas ASN Inspektora t Daerah	Jumlah unit Pengadaan BMD yang disediakan	Nilai AKIP Inspektora t Daerah		Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja					2. Memilih penyedia dan membuat pesanan untuk pengadaan sesuai e catalog 3. Proses e-purchasing pada aplikasi LPSE	
		5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/ Electric 29,440,000			Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 29 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024			Nilai Kematangan Inovasi Inspektora t Daerah		Nilai Kematangan Inovasi Inspektora t Daerah					4. Proses pembelian barang dengan penyedia dan pengiriman barang tersebut 5. Proses Pencairan dana pada SIPD RI 6. Pembayaran tagihan non tunai oleh BP	


 Paiman, September 2025
 Diketahui oleh
 2 Inspektur
 HELLEN HASMERTA SARI, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
 NIP. 10780528 200501 2 004

Term of Reference (TOR) TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

No. Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian belanja operasional kegiatan dan anggaran	Keluaran/Indikator Sub Kegiatan (harus sesuai Kepmendagri 050-5889-2021)	Target	Latar Belakang	Maksud dan Tujuan	Hasil/ (indikator kegiatan; kumulasi dari indikator sub kegiatan)	Capaian program (indikator program sesuai RPJMD)	IKU yang dicapai	IKD yang dicapai	Sasaran/Penerima manfaat (BNBA, kelompok, nagari, disbnya)	Rencana Pengadaan (Cara pelaksanaan kegiatan)	Tempat Pelaksanaan Kegiatan (lokasi; titik koordinat)	Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan (PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Keuangan, dll)	Jadwal kegiatan (rincian waktu pelaksanaan kegiatan)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01														
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.01.01.2.07													Januari s.d Desember 2025	
26	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.01.01.2.07.0002 1,197,731,000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,	Maksud : memfasilitasi pengadaan kendaraan dinas Inspektorat Daerah	Tersedianya Kebutuhan sarana dan prasarana operasional kantor, berupa kendaraan dinas operasional	Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja	Level Maturitas SPIP Penda	Nilai AKIP Inspektora t Daerah	ASN Inspektora t Daerah	Penyedia (e-purchasing)	Kabupaten Pesisir Selatan	PPTK dan PA	1. Entri rencana pengadaan pada aplikasi sirup LPSE pada triwulan I	
		5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 1,197,731,000			Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional	Tujuan : Mendukung operasional pelaksanaan tugas ASN Inspektorat Daerah		Nilai AKIP Inspektora t Daerah		Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja					2. Memilih penyedia dan membuat pesanan untuk pengadaan sesuai e catalog 3. Proses e-purchasing pada aplikasi LPSE	
					Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 29 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024		Jumlah unit Pengadaan BMD yang disediakan	Nilai Kematangan Inovasi Inspektora t Daerah		Nilai Kematangan Inovasi Inspektora t Daerah					4. Proses pembelian barang dengan penyedia dan pengiriman barang tersebut 5. Proses Pencairan dana pada SIPD RI 6. Pembayaran tagihan non tunai oleh BP	

